

Bab. II

I. Laboratorium Diagnostik

1. Diboborapa tempat telah dirintis berdirinya laboratorium diagnostik dan telah terbukti kegunaannya.

Untuk selanjutnya dapat difikirkan perlunya laboratorium diagnostik ini di wilayah-wilayah dengan populasi ternak yang tinggi atau dikaitkan dengan proyek PUTP di wilayah-wilayah tertentu.

2. Manfaat dari laboratorium diagnostik ini dapat dirasakan secara langsung karena diagnosa dapat dilakukan dengan cepat untuk wilayah kerja laboratorium diagnostik tersebut.
3. Namun demikian perlu difikirkan pula kelangsungan kerja laboratorium diagnostik tadi schubungan dengan penyediaan biaya, fasilitas dan tenaga-tenaga.

II. Rumah Potong Hewan

1. Dari kunjungan pada Rumah Potong Hewan yang telah ada disarankan agar kemampuan jumlah potongan/hari ditingkatkan dengan merubah status RPH dengan P.D. Sejauh dimungkinkan diboborapa tempat/kota.
2. Perlindungan pada konsumen daging perlu dirintis dari sekarang, baik mengenai jenis daging, mutu daging dan cara pemotongan daging sehingga karkas dapat dipergunakan dengan lebih offision. Schubungan dengan faktor-faktor hygiene baik tempat maupun karyawananya harus mendapat perhatian, yang sungguh-sungguh.

III. Distribusi sarana

1. Untuk mengatasi berjangkitnya penyakit menular perlu disklarasikan penyediaan obat-obatan dan vaksin/sera serta alat-alat perlengkapananya dengan jumlah ternak serta frekwensi berjangkitnya penyakit disuatu daerah.
2. Kemampuan produksi dari lembaga perhasil vaksin/sera harus disesuaikan dengan program pengamanan ternak.

3. Tenaga vaksinator yang bertugas menangani pengamanan ternak harus disadarkan akan pentingnya tugas yang mereka emban. Penyediaan sekedar intensif bagi petugasnya kiranya perlu mendapat pertimbangan yang sungguh-sungguh.

Bab III.

1. Perencanaan

Perlu adanya data statistik yang meliputi :

- a. Populasi ternak sapi potong yang banyak terdapat di Jawa - Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Pada tempatnyalah di Propinsi-Propinsi tersebut dikembangkan sistim PUTP untuk berubah sistim bagi hasil (marobati/gadu/ngades) yang masih berlangsung.
- b. Pemotongan ternak.
Untuk mempertahankan populasi dan bibit-bibit unggul hendaknya betina-betina pembibit yang masih subur (produktif) dan pejantan-pejantan yang unggul dipertahankan.
- c. Pengeluaran ternak.
Pengeluaran ternak meliputi konsumsi dalam negeri dan export. Hendaknya pemakaian timbangan di pasar hewan atau di tempat-tempat yang telah disediakan, dilaksanakan sehingga petani peternak tidak terlalu dirugikan.
- d. Kelahiran.
Birth-rate yang rendah disamping faktor-faktor penyakit dan faktor-faktor lainnya mengakibatkan populasi ternak menurun. Perlu difikirkan untuk menaikkan birth rate.

2. Penyuluhan

Dinas Poternakan perlu mengadakan penataran (upgrading) kepada tenaga-tenaga penyuluh sehingga benar-benar trampil dalam hal :

- pemilihan bibit yang baik.
- pembuatan kandang, lokasi dan sebagainya

- pengadaan makanan
- perawatan dan pemeliharaan
- mengetahui sosiologi pedesaan

k.lau sarana mengizinkan dianjurkan mengadakan :

- brosur-brosur
- pemutaran film
- denoplot-donoplot (percontohan)
- pameran ternak yang diberi hadiah yang morangsang.

3. Pengembangan Produksi :

- Persyaratan PUTP jangan terlalu berat dengan prosedur yang bertelo-telo sorta pilih kasih.
- Pembuahan buatan (kawin suntik = A.I.) sudah mulai dikenal di Jawa Timur/Madura dan Bali kecuali Nusa Tenggara Barat. Pemerintah hendaknya memikirkan program ini lebih lanjut, melihat di Lombok sendiri ada jenis-jenis sapi Bali yang mempunyai bobot 640 kg, dengan bentuk yang ideal. Demikian pula hasil persilangan (A.I.) sapi import dengan sapi lokal di Madura memberi hasil yang memuaskan dan disonangi masyarakat Madura.
- Soloksi dan kostrasi
Sapi-sapi yang digemukakan (koreman) umumnya dikostrasi sehingga pengemukakan lebih cepat prosesnya. Tetapi Pemerintah melalui Dinas Poternakan hendaknya memikirkan pengamatan typotype pejantan yang unggul.
- Penyediaan makanan ternak.
Hal ini merupakan problema khususnya di Jawa Timur. Dengan adanya penghijauan diharapkan kesulitan makanan lambat laun dapat diatasi. Satu hal yang sudah sedikit maju adalah telah dilakukannya pengeringan makanan di Madura.

4. Pengamanan ternak

1. Pencegahan dan pemberantasan penyakit dapat dilaksanakan melalui :

- mendirikan laboratorium Diagnostik dan penyediaan tenaga-tenaganya.
 - vaksinasi yang teratur terutama terhadap penyakit AE (penyakit mulut dan kuku), SE (Penyakit ngorok) dibawah pengawasan/bimbingan Dinas Poternakan.
 - perawatan dan pemeliharaan ternak yang sebaik-baiknya, meliputi kandang yang cukup luas, sehat dan terpisah dari rumah; makanan dan minuman yang cukup dan mengandung gizi yang baik.
 - melaporkan dengan cepat kepada petugas Dinas Poternakan kalau ada tanda-tanda penyakit.
2. Sapi-sapi yang baru masuk perlu karantina untuk selama 1-2 minggu kalau ternyata sehat dan baik baru dipelihara secara sewajarnya.

5. Pemasaran

Perlu adanya suatu badan yang menangani pemasaran dalam BUUD atau KUD dibawah pengawasan aparat Pemerintah untuk menghindari permainan makelar.

6. Tata laksana

Panca Usaha Ternak Potong (PUTP) hanya dapat berjalan lancar apabila ada kerja sama yang baik, jujur dan disiplin antara :

- Dinas Poternakan
- B.R.I.
- Koperasi
- Pembangunan Masyarakat Desa
- Perkonomian
- Pomda.

Bab IV

Bahwa disektor peternakan penanggulangan masalah pemasaran produksi sangat perlu dilakukan, baik dibidang ternak potong, telur maupun air susu sali.

Untuk penanggulangan masalah pemasaran hasil-hasil peternakan ini, masing-masing komoditi memerlukan badan tersendiri. Sedang ditingkat desa telah ada Badan Usaha yang baru berusaha dibidang pertanian.

Dan kemungkinan untuk memanfaatkan badan ini didalam menanggulangi pemasaran hasil-hasil peternakan sangatlah memungkinkan, hanya diperlukan beberapa perbaikan sarana dan kebijaksanaan serta pembinaan dari beberapa pihak sekaligus terhadap pimpinan badan ini.

Dalam bidang ternak potong masalah pemasaran yang dirasakan peternak perlu mendapat perhatian dari pihak yang berwenang. Kemungkinan perbaikan dalam pemasaran ternak potong ini ada, Pada tiap desa dewasa ini telah ada BUUD/KUD, hanya penggunaan Badan ini sebagai badan yang menangani sektor peternakan perlu perintisan dan bimbingan, baik oleh Dinas Peternakan maupun oleh pemerintah daerah. Badan ini untuk sementara (jangka pendek) dapat diusahakan menangani masalah pemasaran dan kestabilan harga ternak potong, sedang dimasa mendatang dapat meluas kepada bidang makanan ternak dan penyediaan bibit ternak.

Didalam pelaksanaan penanggulangan pemasaran ternak potong oleh BUUD, perlu diperhatikan bahwa sapi hasil penggemukan ini adalah hewan hidup yang sangat peka terhadap pengaruh lingkungan dan makanan, maka diperlukan pertimbangan dan perencanaan yang teliti dan matang.

Disini dapat diambil kebijaksanaan seperti misalnya :

- Peternak menjual hasil penggemukannya kepada BUUD, sedang apabila BUUD belum mempunyai sarana penampungan, maka ternak untuk jangka waktu tertentu tetap pada petani agar berat badannya tetap terjaga. Dan untuk itu diperlukan peraturan lain.
- Penetapan harga adalah per kilogram berat badan, dan untuk setiap ekor ditentukan batas minimum seekor sapi.

- Untuk memperlancar kerja BUUD disektor Peternakan ini maka pada tingkat kabupaten diperlukan sarana khusus yaitu holding ground, sebagai tempat penampungan bagi ternak yang siap dipasarkan.
- Penjual ternak dari setiap daerah hanya melalui BUUD/KUD yang ada atau melalui holding ground.

Dalam bidang peternakan unggas, terutama komoditi telur ayam ras. Sangatlah diharapkan akan adanya campur tangan pemerintah mengenai :

- Peraturan yang memberi perlindungan kepada produksi didalam negeri dan stabilitas harga bahan makanan ternak.
 - Hal yang dapat solokasnya dilaksanakan untuk membantu peternak ayam ras seperti BIMAS ayam didalam pemasaran produksi. Misalnya melalui suatu peraturan yang menyangkut penjualan produksi antara peternak peserta BIMAS dan peternak komersil.
- Dan koordinasi antara pemerintah daerah, dinas peternakan dan peternak, yang telah ada pada wadah tertentu (koperasi/BUUD).

Mengenai komoditi susu, perlu adanya perhatian dari beberapa instansi dalam hal :

- Perbaikan dan pemeliharaan koperasi yang telah ada terutama fasilitas dan sarana prosesi serta kursus tentang pengelolaan koperasi bagi anggota koperasi susu tadi.
- Penentuan harga air susu yang diterima oleh petani peternak sapi perah yang layak, disini sebaiknya perbandingan harga susu yang diterima pemilik sapi dan harga susu yang dibayarkan oleh konsumen tidak terlalu jauh berbeda, ini penting karena adanya keuntungan bagi pemilik sapi akan merangsang pemilik memperbaiki produksi air susu sapi.
- Perlu adanya campur tangan pemerintah dalam hal usaha peningkatan produksi susu didalam negeri, sehubungan dengan adanya industri susu disekitar kota-kota besar yang memproduksi secara besar-besaran tanpa menyedot produksi susu dari peternakan milik rakyat, sebaliknya hal ini justru mengerem peningkatan produksi susu peternakan rakyat akibat kesulitan pemasaran susu segar.

Bab V

1. Pada tahun-tahun terakhir ini export ternak Indonesia ke Hongkong menunjukkan tendensi menurun akibat persaingan dengan RRC dan Australia. Hal ini akan membawa akibat berantai sampai unit peternakan yang paling kecil di negeri ini yaitu petani peternak di desa-desa apabila tidak diambil tindakan dan kebijaksanaan oleh pemerintah dibidang pemasaran ternak baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Selain resesi ekonomi dunia pada tahun 1974 yang menyebabkan penurunan permintaan Hongkong akan ternak, Australia yang tadinya mempunyai tempat pemasaran ternak ke Amerika, Jepang dan negara-negara MEE, mulai mengalihkan sebagian exportnya ke Hongkong, secara tidak langsung telah merugikan Indonesia. Persaingan dengan RRC dapat mengatasi mengingat kualitas ternak Indonesia jauh lebih tinggi dari pada ternak RRC, namun demikian RRC potensial merupakan suatu ancaman dalam persaingan perdagangan ternak Indonesia dikoloni Inggris tersebut. Permainan harga oleh pedagang setempat di Hongkong-pun dapat sangat merugikan. Pemerintah Indonesia dapat mengadakan suatu perjanjian kerja sama dalam bidang perdagangan ternak dengan Hongkong, sotidak-tidaknya dengan Australis untuk membatasi export ternaknya ke Hongkong yang sudah secara tradisional merupakan tempat pemasaran ternak Indonesia, toh Australia sudah mempunyai daerah-daerah pemasaran ternak yang jauh lebih luas dari pada Indonesia. Pejataan export ternak ke Hongkong harus disesuaikan dengan jumlah permintaan untuk mempertahankan harga ternak agar pedagang tidak rugi. Export ternak dari RRC meningkat selama bulan September sampai Desember. Oleh karena itu export dari Indonesia sebaiknya dilaksanakan secara intensif antara bulan Januari sampai September setiap tahun.
2. Penyediaan makanan ternak dikapal perlu diperbaiki untuk selain memenuhi persyaratan Dinas Peternakan, juga dapat mempertahankan berat badan dan memelihara kesehatan ternak selama perjalanan. Rumput kering dianggap kurang baik, karena selain nilai gizinya yang rendah, juga mudah menimbulkan kobakaran dan memerlukan

ruangan yang lebih banyak. Penyediaan makanan yang lebih ideal bagi ternak di kapal adalah dalam bentuk "pellet". Produksi makanan ternak dalam bentuk pellet sudah dijajagi di Indonesia. Peningkatan produksi dan pemasarannya secara meluas perlu dianjurkan.

3. Pemasaran ternak inter-insular di Indonesia perlu diatur dan ditingkatkan. Suatu hal yang perlu diperhatikan secara serius dan perlu ditindak secara tegas adalah penyelundupan ternak antar pulau, khususnya dari Bali dan Lombok ke Pulau Jawa, yang selain merugikan negara dan mengganggu harga pasaran, juga dengan mudah menyebarkan penyakit hewan menular.
 4. "Job description" dan spesialisasi tugas kerja lembaga "Virologi" kehewan perlu dipertegas agar supaya segala daya dan dana yang ada dapat dipergunakan se-offisien dan semaksimal mungkin dalam rangka pengamanan ternak yang sangat vital dalam masa pembangunan ini. Disarankan agar supaya usul untuk merubah fungsi lembaga tersebut menjadi suatu Pusat Produksi Vaksin Viral maupun Bakterial dan produksi serum/antisera perlu ditanggapi oleh pemerintah secara serius dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Adalah pin-cang apabila Pusat-pusat Penyelidikan Penyakit Hewan (Disease Investigation Center) mulai banyak didirikan di Indonesia disamping Lembaga Penelitian Penyakit Hewan yang sudah ada, akan tetapi suatu lembaga atau Pusat Produksi Vaksin Serum dan Antisera yang khusus dan bekerja secara penuh belum ada. Agak ironis apabila ditelaah bahwa untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku (FMD) yang telah dan sedang dilakukan secara besar-besaran di Indonesia (mulai dari Bali kearah Barat) dipergunakan vaksin FMD dari luar negeri sedangkan vaksin tersebut dapat diproduksi di LVK Surabaya. Apakah hal ini adalah akibat kurang jelasnya "job description" lembaga tersebut yang dibarengi dengan tidak adanya tunjangan dan bantuan untuk memproduksi vaksin yang dikohondaki untuk tugas pengamanan ternak tersebut diatas ?
- Semoga bangsa Indonesia dapat mendewasakan diri dengan mengandalkan kesanggupan sendiri dalam soal-soal yang memang sudah dapat

ditangani di dalam negeri. Yang jelas vaksin yang dibuat di luar negeri tidak selalu sesuai dan "kona" untuk dipakai di Indonesia yang memiliki type atay variant suatu macam bibit penyakit yang berbeda dari pada di negeri penghasil vaksin tersebut.

5. Mengenai pengenalan Fakultas Kedokteran Hewan ke masyarakat, ke Sekolah-Sekolah Lanjutan Atas pada khususnya, untuk menimbulkan minat yang lebih besar memasuki Fakultas tersebut, diajukan saran-saran sebagai berikut :
 - a) Fakultas Kedokteran Hewan IPB, supaya lebih meng "expose" kan diri ke masyarakat luas keseluruh pelosok tanah air baik secara institusionil, baik individuil oleh staf pengajarnya, maupun massal oleh mahasiswanya.
 - b) Pengumuman penerimaan mahasiswa baru oleh FKH dan/atau IPB harus dilakukan secara gencar, dan meluas jauh sebelum waktu pendaftaran.
 - c) Waktu pendaftaran harus disesuaikan dengan selesainya masa ujian dan pengumuman ujian di Sekolah-Sekolah Lanjutan Atas.
 - d) Batas waktu pendaftaran harus dibeda-bedakan antara berbagai daerah sesuai dengan jarak dan lancar-tidaknya komunikasi dari daerah tersebut ke Bogor.
 - e) Mengingat kurikulum profesi Dokter Hewan selama 6 tahun jauh lebih lama dari pada Fakultas lain (4 tahun), apakah tidak sebaiknya FKH-IPB melakukan pendaftaran/penerimaan mahasiswa baru tersendiri ?
 - f) Lamanya tugas belajar di FKH itu sendiri perlu ditinjau kembali, misalnya menjadi 5 tahun seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
 - g) Syarat-syarat memasuki FKH-IPB perlu diperlunak tanpa mengurangi kualitas pendidikan dan mutu alumni yang dihasilkan Fakultas tersebut.
 - h) Kepada mahasiswa baru FKH-IPB perlu ditawarkan beasiswa dan disediakan asrama terutama bagi mereka yang tidak mampu dan berasal jauh dari Bogor.

6. Kuliah Kerja Lapangan atau praktok daerah atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan IPB sebaiknya tidak hanya berpusat di Jawa - Bali saja, tetapi sedapat mungkin diusahakan juga keluar Jawa misalnya ke Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung dan daerah-daerah peternakan lainnya. Pencarian biaya, yang tidak mungkin diperoleh dari biaya rutin Fakultas atau IPB, dapat diusahakan dari luar secara inkonvensional baik oleh Fakultas maupun oleh ante aktivitas mahasiswa itu sendiri.

MEDIA VETERINER

Dikeluarkan oleh :
Biro Dekan Fakultas Kedokteran Hewan IPB
Telpon Kencana No. 1, Bogor.
Telpon : 557 / 558

Pelindung : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor.

*** Redaksi :**

Penanggung Jawab :

Dr. T. M. Sutamihardja
Drh. Erom Wargadipura
Drh. Sunarja Prawiradisastra

Anggota : Drh. Mozes R. Toelihere, M. Sc.

Drh. Roso Soejoedono, MPH.
Dr. Reviany Widjajakusuma
Drh. Koeswinarning Sigit
Drh. Rudy Bawolje
Dr. C. Sri Utami Pramono
Drh. Mansjur Hawab
Drh. Harsono
Drh. Gloria Suwiria
Drh. Abadi Sutisna
Drh. Humaedi Sutarman
Drh. Sabdi Hasan Aliambar
Dra. Retno Dewi Widjojowati

Pelaksana Tehnis/Distributor :

Hartinah
Harjati
Abdul Karim
Sukatma Wasdjan

Media ini terbit 4 - 6 kali setahun

Redaksi menerima bahan dari luar yang menyangkut bidang veteriner atau yang ada hubungannya.

Isi media dapat dikutip dengan menyebut sumbernya
